



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN SWASEMBADA ENERGI

Hilma Meilani

Analisis Legislatif Ahli Madya
hilma.meilani@dpr.go.id

Audry Amaradyaputri Suryawan

Analisis Legislatif Ahli Pertama
audry.suryawan@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Di tengah perubahan kepemimpinan nasional, Indonesia kini memasuki era baru yang menempatkan swasembada energi sebagai sasaran prioritas. Melalui pidato pertamanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kesiapan nasional dalam menghadapi perubahan geopolitik global yang semakin dinamis, serta perlunya swasembada dalam sektor energi. Mengingat potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar dan beragam, pemanfaatan yang optimal dapat menjadi langkah penting untuk mencapai sasaran ini.

Upaya mewujudkan swasembada energi dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ketidakcukupan produksi minyak bumi yang pada tahun 2023 hanya mencapai 606.000 barel per hari (bph), jauh di bawah kebutuhan konsumsi nasional sebesar 1,6 juta bph. Kondisi ini memaksa Indonesia mengimpor minyak sekitar 1 juta bph, dengan biaya impor mencapai sekitar Rp500 triliun per tahun, yang menjadi beban signifikan bagi ekonomi nasional.

Strategi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam menghadapi tantangan tersebut adalah menerapkan pengawasan ketat terhadap kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sekaligus mendorong optimalisasi penemuan cadangan baru. SKK Migas juga memantau evaluasi terhadap *idle fields*, *stranded Plan of Development (PoD)*, dan *undeveloped discoveries*. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 110.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan dalam Rangka Optimalisasi Produksi Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas berwenang untuk mengambil tindakan terhadap lapangan yang termasuk dalam kategori *idle field* lebih dari 3 tahun, *stranded PoD* lebih dari 2 tahun, dan *undeveloped discovery* lebih dari 3 tahun. Untuk meningkatkan *lifting* minyak bumi, SKK Migas berencana mengeluarkan rekomendasi pada Januari 2025 yang meliputi empat opsi, yaitu dikerjakan sendiri dengan mengajukan insentif, dikerjakan bersama dengan badan usaha, menunjuk Kerja Sama Operasi (KSO), atau dikembalikan kepada negara. Strategi lainnya mencakup pemetaan sumur potensial dan penerapan teknologi baru dalam eksplorasi.

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan swasembada energi, Kementerian ESDM melakukan langkah strategis, yaitu peningkatan *lifting* minyak bumi dan konversi kendaraan berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi listrik untuk mengurangi konsumsi BBM. Berkaitan dengan peningkatan *lifting* minyak bumi, Kementerian ESDM berkomitmen untuk membatalkan kontrak kerja sama yang tidak dijalankan secara optimal dan menuntut KKKS mengoptimalkan potensi minyak dan gas bumi (migas) di wilayah kerja yang dikelolanya. Jika ditemukan kelalaian dalam pemanfaatan potensi tersebut, izin dan kontrak dapat dicabut, dan wilayah kerja akan dilelang ulang.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan swasembada energi di Indonesia adalah ketergantungan yang tinggi pada impor BBM. Dalam tujuh tahun terakhir, terjadi peningkatan impor bensin hingga sekitar 15 juta barel, seiring naiknya konsumsi BBM domestik. Strategi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut dan menekan konsumsi BBM adalah pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya Bahan Bakar Nabati (BBN). Pemerintah berupaya memanfaatkan bahan baku lokal untuk menghasilkan biodiesel, bioetanol, serta bioavtur sebagai alternatif BBM.

Program implementasi biodiesel B35 oleh PT Pertamina (Persero) telah menunjukkan dampak positif, termasuk penurunan emisi CO₂ hingga 32,7 juta ton pada tahun 2023. Pemerintah berencana meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40 pada tahun 2025, yang akan dilanjutkan hingga mencapai B60 dalam beberapa tahun mendatang. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa stok *Crude Palm Oil* (CPO) untuk program-program ini akan aman, namun penting untuk mempertimbangkan produksi tahunan CPO, kebutuhan ekspor, serta kebutuhan *food* dan *feed domestik*. Selain itu, kesiapan teknologi menjadi faktor penting karena implementasi B40 hingga B60 memerlukan pengembangan teknologi secara bertahap agar dapat diuji coba secara optimal. Saat ini, program B40 sedang menjalani uji coba pada mesin non-otomotif. Untuk mendukung program ini, pemerintah akan mendorong pelaku usaha yang belum mengeksport produk sawit untuk memasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku BBN melalui kebijakan pendukung. Dalam jangka panjang, pengembangan BBN diharapkan dapat mendukung swasembada energi dan tercapainya target *net zero emission* pada tahun 2060.

Atensi DPR

Upaya mewujudkan swasembada energi menjadi sangat penting di tengah dinamika geopolitik global dan kebutuhan energi domestik yang terus meningkat. Oleh karena itu, perhatian serius dari DPR RI, khususnya Komisi XII yang membidangi energi, sangat diperlukan dalam menangani isu ini. Dalam rangka fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI perlu memantau kinerja Kementerian ESDM dan SKK Migas dalam mengoptimalkan potensi sumber daya energi, termasuk peningkatan *lifting* minyak bumi, pengembangan BBN, dan EBT lainnya. Komisi XII DPR RI perlu mendorong pemerintah agar kebijakan dan program energi nasional berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan target swasembada energi serta *net zero emission* pada tahun 2060 dapat tercapai. Dalam rangka fungsi legislasi, Komisi XII DPR RI perlu mendorong penyelesaian RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang menjadi payung hukum bagi kebijakan pendukung pengembangan BBN dan EBT lainnya.

Sumber

Bisnis Indonesia, 21, 22 dan 23 Oktober 2024;
bisnis.com, 21 Oktober 2024;

esdm.go.id, 24 Oktober 2024;
kontan.co.id, 21 dan 23 Oktober 2024.



EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024